

PENGUMUMAN

NOMOR : 1120 /D.4.3/05/2019

KEGIATAN DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM

**“SOSIALISASI LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH”**

dan

**“PENYAMAAN PERSEPSI TERKAIT PENANGANAN PERMASALAHAN KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”**

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. LATAR BELAKANG

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan serangkaian proses kegiatan dalam rangka memperoleh barang/jasa yang diawali dengan perencanaan kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Hasil catatan yang didapatkan LKPP berdasarkan perkembangan kebutuhan dan penyesuaian kondisi dalam rangka pembahasan perubahan ketentuan pengadaan, didapatkan fakta bahwa terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kontrak. Pengertian dan batasan perselisihan kontrak adalah sengketa yang timbul dalam (masa) pelaksanaan kontrak akibat ketidaksesuaian pemahaman atas ketentuan yang telah disepakati dalam suatu surat perjanjian (kontrak), atau perbuatan para pihak dalam pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan perjanjian dan dianggap sebagai wanprestasi oleh pihak lainnya.

Berbagai permasalahan kontrak terjadi akibat kesalahpahaman dalam interpretasi kontrak pengadaan. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kontrak, dibutuhkan peningkatan pemahaman, salah satunya melalui penyamaan persepsi suatu kontrak pengadaan barang/jasa. Lebih lanjut, salah satu program dari Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum dalam upaya penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah, terdapat Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS PBJP). Sehubungan dengan dilaksanakan

layanan LPS PBJP, maka diperlukan pengenalan lebih luas kepada para *stakeholder* pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hal ini dipandang penting, demi terciptanya pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien juga terhindar dari segala bentuk permasalahan pengadaan barang/jasa dan kerugian negara.

3. RINCIAN KEGIATAN

a. Pelaksanaan

Kegiatan yang hendak dilaksanakan terdiri dari 2 kegiatan. Adapun rincian kegiatan masing-masing acara tersebut sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1	Pengenalan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rabu, 10 Juli 2019 (<i>Fullday Meeting</i>)	Hotel di Gorontalo (<i>tentative</i>)
2	Penyamaan Persepsi Terkait Penanganan Permasalahan Kontrak	Kamis, 11 Juli 2019 (<i>Fullday Meeting</i>)	Hotel di Gorontalo (<i>tentative</i>)

b. Susunan Acara

Adapun susunan acara terlampir.

4. KETENTUAN

Adapun persyaratan untuk mengikuti kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengenalan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- PNS yang bertugas di Inspektorat, Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D), dan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Pemerintah Daerah di Sulawesi;
- Peserta wajib melakukan pendaftaran secara *online* melalui link <http://bit.ly/LPSGorontalo>;
- Lembar Konfirmasi dapat diunduh di *website* LKPP, setelah diisi oleh Peserta kemudian dikirim ke alamat *e-mail* subdirektoratkontrak@gmail.com dengan subjek "Nama_LPSGorontalo" paling lambat tanggal 28 Juni 2019;
- Peserta diharuskan hadir selama kegiatan berlangsung yaitu sejak awal sampai akhir kegiatan dan **tidak bisa diwakilkan**.

2. Kegiatan Penyamaan Persepsi Terkait Penanganan Permasalahan Kontrak:

- PNS yang bertugas di Biro/Bagian/Bidang Hukum atau Biro/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Sulawesi;
- Peserta wajib melakukan pendaftaran secara *online* melalui link <http://bit.ly/PersepsiKontrakGorontalo>;
- Lembar Konfirmasi dapat diunduh di *website* LKPP, setelah diisi oleh Peserta kemudian dikirim ke alamat *e-mail* subdirektoratkontrak@gmail.com dengan subjek "Nama_PersepsiKontrakGorontalo" paling lambat tanggal 28 Juni 2019;
- Peserta diharuskan hadir selama kegiatan berlangsung yaitu sejak awal sampai akhir kegiatan dan **tidak bisa diwakilkan**.

3. Penetapan peserta yang berhak mengikuti kegiatan, mutlak ditentukan oleh Panitia Kegiatan;
4. Masing-masing Peserta diharuskan membawa laptop;
5. Keikutsertaan peserta dalam kegiatan tidak dipungut biaya;
6. LKPP hanya menanggung biaya *Fullday Meeting* selama kegiatan. Adapun biaya yang diluar hal tersebut (hotel, transportasi, dan lain-lain) bukan merupakan tanggungjawab LKPP;
7. Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi *Contact Person* kami melalui Sdr. Kamelia (0822 7960 1636) atau nomor telepon (021) 2991 2450 ext. 0343/0348.

Jakarta, 24 Mei 2019

Direktur Penanganan Permasalahan Hukum



Setya Budi Arijanta

**SUSUNAN ACARA KEGIATAN
SOSIALISASI LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
GORONTALO, 10 JULI 2019**

No	Pukul (WITA)	Materi	Narasumber
1	07.30 - 08.00	Registrasi	
2	08.00 – 08.30	Pembukaan	Narasumber: Bapak Setya Budi Arijanta (Direktur Penanganan Permasalahan Hukum)
3	08.30 – 10.00	Pemaparan Materi "Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa"	Narasumber: Bapak Setya Budi Arijanta (Direktur Penanganan Permasalahan Hukum)
4	10.00 - 12.00	Pembahasan Materi: "Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 dan Aplikasi SIELSA LKPP"	Narasumber: M Taufikkurohman (Analisis Sistem Informasi)
5	12.00 - 13.00	ISHOMA	
6	13.00 - 15.00	Pembahasan Materi: "Pengenalan Mediasi"	Narasumber: Pusat Mediasi Nasional
7	15.00 - 17.00	Pembahasan Materi: "Mitigasi Kontrak"	Narasumber: Bapak Mudjisantosa (Kepala Subdirektorat Penanganan Permasalahan Kontrak)

****Susunan acara dapat berubah menyesuaikan kondisi***

SUSUNAN ACARA KEGIATAN
PENYAMAAN PERSEPSI TERKAIT PENANGANAN PERMASALAHAN KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Gorontalo, 11 Juli 2019

No	Pukul (WITA)	Materi	Narasumber
1	07.30 - 08.00	Registrasi	
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	Narasumber: Bapak Setya Budi Arijanta (Direktur Penanganan Permasalahan Hukum)
3	08.30 - 10.00	Pemaparan Materi "Permasalahan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"	Narasumber: Bapak Setya Budi Arijanta (Direktur Penanganan Permasalahan Hukum)
4	10.00 - 12.00	Pembahasan Materi: "Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa"	Narasumber: M Taufikkurohman (Analisis Sistem Informasi)
5	12.00 - 13.00	ISHOMA	
6	13.00 - 15.00	Pembahasan Materi: "Pengendalian Kontrak"	Narasumber: Wiwik Widyawati Mayang (Fungsional PBJ Kementerian Agama Gorontalo)
7	15.00 - 17.00	Pembahasan Materi: "Mitigasi Kontrak"	Narasumber: Bapak Mudjisantosa (Kepala Subdirektorat Penanganan Permasalahan Kontrak)

**Susunan acara dapat berubah menyesuaikan kondisi*

Lembar Konfirmasi Peserta
Sosialisasi Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Gorontalo, 10 Juli 2019

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan (coret salah satu)
NIP :
Jabatan :
Golongan/Pangkat :
Unit Kerja & Instansi :
Alamat Instansi :
Telp/HP :
E-mail :

Bersedia untuk mengikuti kegiatan selama 1 (satu) hari (sesuai dengan susunan acara) pada hari Rabu, 10 Juli 2019 di Hotel di Gorontalo (*tentative*). Jumlah peserta pada kegiatan ini dibatasi kuota sebanyak 60 (enam puluh) orang. Keputusan panitia dalam menetapkan peserta tidak dapat diganggu gugat.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

....., Juni 2019

Peserta,

Atasan Langsung,

(.....)

(.....)

*Harap dikirim melalui *e-mail* **subdirektoratkontrak@gmail.com** dengan subjek "Nama_LPSGorontalo" **paling lambat tanggal 28 Juni 2019** dan **penetapan peserta oleh LKPP pada hari Senin, 1 Juli 2019**. Untuk memudahkan konfirmasi dapat menghubungi *Contact Person* kami melalui Sdr. Kamelia (0822 7960 1636) atau nomor telepon (021) 2991 2450 ext. 0343/0348.

Lembar Konfirmasi Peserta*
Kegiatan Penyamaan Persepsi Terkait Penanganan Permasalahan Kontrak
Gorontalo, 11 Juli 2019

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan (coret salah satu)
NIP :
Jabatan :
Golongan/Pangkat :
Unit Kerja & Instansi :
Alamat Instansi :
Telp/HP :
E-mail :

Bersedia untuk mengikuti kegiatan selama 1 (satu) hari (sesuai dengan susunan acara) pada hari Kamis, 11 Juli 2019 di Hotel di Gorontalo (*tentative*). Jumlah peserta pada kegiatan ini dibatasi kuota sebanyak 60 (enam puluh) orang. Keputusan panitia dalam menetapkan peserta tidak dapat diganggu gugat.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Peserta,

....., Juni 2019

Atasan Langsung,

(.....)

(.....)

*Harap dikirim melalui *e-mail* **subdirektoratkontrak@gmail.com** dengan subjek "Nama_PersepsiKontrakGorontalo" **paling lambat tanggal 28 Juni 2019** dan **penetapan peserta oleh LKPP pada hari Senin, 1 Juli 2019**. Untuk memudahkan konfirmasi dapat menghubungi *Contact Person* kami melalui Sdr. Kamelia (0822 7960 1636) atau nomor telepon (021) 2991 2450 ext. 0343/0348.